

Judul : Rencana penambahan jumlah komisi DPR dikritik
Tanggal : Senin, 23 Mei 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

Rencana Penambahan Jumlah Komisi DPR Dikritik



DHEMAS REVIVANTO ATMODOJO

Banyak Duit, Sedikit Kerja

Besarnya anggaran DPR setiap tahun tidak berbanding dengan kinerjanya. Peneliti dari Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan tahun lalu anggota dan Sekretariat Jenderal DPR mendapat anggaran sekitar Rp 5 triliun. Namun wakil rakyat hanya bisa menyelesaikan tiga dari 37 rancangan atau revisi undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional 2015.

2011

Anggaran Legislasi:
Rp 301,7 miliar
RUU Prioritas: 91
RUU yang disahkan: 18

2012

Anggaran Legislasi:
Rp 501,2 miliar
RUU Prioritas: 69
RUU yang disahkan: 10

2013

Anggaran Legislasi:
Rp 473,9 miliar
RUU Prioritas: 75
RUU yang disahkan: 7

2014

Anggaran Legislasi:
Rp 339,1 miliar
RUU Prioritas: 68
RUU yang disahkan: 3

2015

Anggaran Legislasi:
Rp 430,5 miliar
RUU Prioritas: 37
RUU yang disahkan: 3

2016

Anggaran Legislasi:
Rp 309,4 miliar
RUU Prioritas: 40

● HUSSEIN ABRI YUSUF

SUMBER: INDONESIA BUDGET CENTER

Suasana rapat paripurna di Gedung Nusantara II, kompleks Senayan, Jakarta, Jumat lalu.

IKLAN

Kinerja buruk DPR dinilai disebabkan sedikit bersidang tapi banyak reses.

Hussein Abri Yusuf Muda

hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA Rencana Dewan Perwakilan Rakyat menambah jumlah komisi, dari saat ini sebanyak 11 komisi, menuai kritikan. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mensinyalir ide tersebut hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan di Kompleks Parlemen, Senayan. Bertambahnya jumlah salah satu alat kelengkapan DPR tersebut otomatis menambah jabatan berupa pimpinan komisi.

Padahal, menurut Lucius, rendahnya kinerja DPR, terutama dalam pembahasan undang-undang, disebabkan oleh buruknya perencanaan. "Dewan tidak punya niat kerja untuk lebih baik," katanya, kemarin.

Lucius balik mempersoalkan masa persidangan Dewan yang pendek, yakni hanya 4-5 kali setiap tahun. Pada saat yang sama, pembahasan undang-undang kerap terpotong masa reses yang jumlahnya

sama dengan masa sidang. Pada April, misalnya, dalam catatan Formappi, DPR hanya masuk 18 hari tanpa melahirkan satu pun produk perundangan. Padahal target legislasi 2016 sangat ambisius, yakni 40 rancangan undang-undang.

Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, juga ragu penambahan jumlah komisi kerja akan meningkatkan kinerja DPR. Dia mencurigai wacana ini untuk menghidupkan kembali rencana pembangunan gedung DPR yang saat ini tertunda lantaran mendapat banyak kecaman. "Tambah komisi, tambah ruang, dan tambah anggaran," katanya. Dalam catatan IBC, saat ini setiap komisi kerja DPR menghabiskan anggaran hingga Rp 65 miliar per tahun.

Rencana penambahan komisi pernah mencuat dua tahun lalu, tapi tak terwujud. Kemarin, gagasan serupa dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan, Ahmad Riza Patria, setelah menghadiri sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat. Dia mengatakan tambahan

jumlah komisi diperlukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi di DPR, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dia menilai mitra kerja setiap komisi—yang kini berjumlah 11 komisi—terlalu banyak, yaitu rata-rata 12 kementerian dan lembaga. Akibatnya, pertemuan komisi dan mitra kerja sangat terbatas. Fungsi pengawasan dan pembahasan undang-undang pun menjadi kurang mendalam.

Menurut Riza, untuk merealisasi penambahan komisi, rencana ini harus diusulkan oleh seluruh fraksi. Dia mengakui hingga sekarang ide ini baru dibahas di internal fraksi. "Belum jadi usulan. Tapi ada saatnya diusulkan," kata politikus Gerindra ini. "Wacana awal menjadi 13 komisi, dan bertahap."

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Irma Suryani Chaniago, berharap penambahan jumlah komisi dikaji ulang. Menurut dia, sebaiknya partai memilih anggota yang berkompeten dan memiliki waktu yang cukup di Badan Legislasi untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, diperlukan tenaga ahli yang kredibel. "Jadi tidak harus tambah komisi," tuturnya.

● GHONDA RAHMAH